

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam mendukung kegiatan usaha kecil dan menengah, pemerintah melakukan dukungan melalui kebijakan agar tidak berhenti di tengah jalan. Fakta menunjang bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok UKM tersebut jauh lebih banyak dibandingkan tenaga kerja yang bisa diserap oleh usaha besar.

adanya UU NO. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovasi dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Salah satu yang menjadi potensi di tiap daerah adalah keberadaan usaha kecil menengah (UKM). UKM memiliki peran yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapat daerah maupun masyarakat lokal. Salah satunya adalah kota yang menempatkan usaha kecil menengah (UKM). pada pada posisi yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Dapat dinyatakan berupa estimasi financial,

sedangkan anggaran sendiri adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit yang mengandung nuansa politik yang tinggi. (Mardiasmo, 2009:61)

Konsep penganggaran sektor publik dan masalah mendasar yang berhubungan dengan penentuan dengan program anggaran merupakan hal penting bagi suatu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya. Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik merupakan penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam waktu yang akan dicapai pada periode waktu tertentu. Anggaran dapat diartikan sebagai perumusan dan pengelolaan rencana strategis untuk aktivitas yang akan dilakukan atau tujuan yang hendak dicapai dalam hal ini tujuan yang maksud yaitu penyediaan pelayanan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut data yang dihimpun oleh Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi UKM Kota Kupang, permasalahan UKM berkaitan dengan permodalan, pemasaran, pengelolaan yang kurang profesional. Di karenakan kurangnya pengetahuan yang di miliki UKM.

Pemerintah Kota Kupang Nusa Tenggara Timur mendorong para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah ini untuk memasarkan berbagai hasil usaha melalui pemasaran secara daring. Sehingga bisa tetap beroperasi di tengah pandemik covid-19. Dampak pandemi covid-19 terhadap UMKM di Kota Kupang

sangat terasa, banyak pelaku usaha yang terdampak sehingga kegiatan usahanya ada yang berhenti akibat sepi pembeli.

Pemerintah Kota Kupang yaitu Dinas Koperasi UKM memiliki anggaran untuk pemberdayaan UKM sebesar Rp1.500.000.000,- untuk tahun 2019 dan upaya pemerintah Kota Kupang dalam membantu pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19, sebesar Rp1.639.610.00,- untuk tahun 2020. Dibutuhkan kerja sama dari pemerintah daerah yaitu Dinas Koperasi UKM Kota Kupang yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Dinas koperasi UKM Kota Kupang memiliki program dalam mengembangkan UKM salah satunya rencana strategis (RENSTRA).

Di Kota Kupang dilihat dari tahun 2018 sampai dengan 2020 jumlah pedagang bertambah, dapat di lihat bahwa jumlah pedagang kecil, menengah dan besar mengalami peningkatan setiap tahun.

Berikut ini adalah data jumlah usaha, kecil, dan menengah (UKM) di Kota Kupang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

NO	Jenis UKM	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Perdagangan	12.845	13.513	13.513
2	Peternakan	776	776	776
3	Jasa	1.509	1.059	1.509
4	Perikanan	26	26	26
5	Industry	172	172	172
6	Pertanian	184	184	184
7	Aneka usaha	92	92	92
8	Komunikasi	4	4	4
	Jumlah	15.608	16.276	17.175

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang tahun 2019

Dari tabel 1.1 di atas jumlah UKM di Kota Kupang meningkat dari tahun ketahun sehingga mampu membantu perekonomian masyarakat Kota Kupang. Upaya tersebut tentu saja tidak terlepas dari kerja keras dari pemerintah dalam mengembangkan potensi pemberdayaan UKM yang ada. Menurut Kuncoro (1995), UKM perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah dan pengusaha mikro perekonomian yang berbasis kemandirian agar siap bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Kota Kupang selain sebagai pusat pemerintah juga merupakan barometer atau pusat perdagangan provinsi. Sampai tahun 2020 telah berkembang cukup banyak untuk usaha perdagangan yang berskala besar maupun kecil yang tersebar di wilayah Kota Kupang. Meningkatnya jumlah pusat atau sentra – sentra perdagangan dan

koperasi di Kota Kupang berdampak sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Kupang dan penyerapan tenaga kerja, karena UKM adalah tempat di mana banyak orang yang menggantungkan sumber kehidupan. Salah satu pelaku usaha yang berkembang di Kota Kupang adalah usaha kecil dan menengah yang terbesar dalam 6 (enam) kecamatan yang merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendirinya berdasarkan inisiatif seorang dan UKM juga memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang berpotensi. Untuk meningkatkan kinerja pelaku usaha kecil dan menengah dilakukan pembinaan dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku agar mampu berinovasi dan berkeaktifitas secara profesional sehingga produksi yang dihasilkan memiliki mutu dan berdaya saing dalam pemasaran.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki kontribusi penting dan besar terhadap pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Kontribusi dalam menciptakan peluang kerja, sangat membantu dalam upaya mengurangi pengangguran. Di saat perusahaan – perusahaan besar tumbang oleh krisis fluktuasi mata uang, tetap mampu bertahan.

Perkembangan UKM merupakan potensi yang sangat dan strategis dalam perekonomian nasional. Karena selain memiliki jumlah yang besar, UKM juga menyebar hingga ke pelosok pedesaan. UKM juga menghadapi berbagai permasalahan yang cukup mendalam.

anggaran menurut Nafarin (2007: 11), merupakan suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan.” Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam suatu uang, tetapi juga dapat dinyatakan dalam suatu barang atau jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Amiruddin (2013) yang berjudul pemberdayaan usaha kecil dan menengah binaan dinas perdagangan Kota Surabaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan menyatakan bahwa usaha kecil, dan menengah menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, UKM juga mampu berperan dan berfungsi sebagai katup pengaman untuk usaha kecil menengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2001: 488), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam suatu moneter standar dan satuan ukuran yang lainnya mencakup jangka waktu satu tahun.

1.1.Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Anggaran Dinas Koperasi dan UKM. Penelitian ini pun penting dilakukan untuk melihat Anggaran Dinas Koperasi dan UKM di Kota Kupang.oleh karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “**ANGGARAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN USAHA, KECIL, DAN MENENGAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 –2020**”

1.2 Persoalan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi persoalan penelitian yaitu: Bagaimana Peran Anggaran Dinas Koperasi UKM berperan untuk Pemberdayaan usaha kecil, dan menengah di Kota Kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana peran Anggaran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian- penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang Anggaran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kota Kupang.

2. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi pengusaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi perusahaan dalam pengelolaan aktivitas operasional bagi pemilik atau manajer perusahaan mengenai Anggaran Dinas Koperasi UKM dalam pemberdayaan UKM